STRATEGI, TAKTIK DAN AGENDA FORUM WARGA DALAM MENGHADAPI PEMILU 2004 DAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH SECARA LANGSUNG[1]

Oleh: Bakaruddin R Ahmad[2]

Abstract

This article try to give some idea about how should forum warga faced the 2004 general election and head of region direct election. As one of interest group in local area, forum warga must prove their position to another mass.

Pendahuluan

Tak dapat disangkal bahwa Undang-Undang Pemilu yang disahkan DPR pada 18 Februari 2003 yang lalu telah menghasilkan suatu perubahan, yaitu perubahan model pemilihan. Jika dalam pemilu-pemilu sebelumnya pemegang hak pilih hanya mencoblos tanda gambar maka dalam pemilu 2004 yang akan datang, pemilih tidak hanya memilih tanda gambar tetapi juga memilih calon (orang). Penekanannya adalah pada siapa yang dapat mewakili daerahnya atau setidak-tidaknya mewakili kepentingan pemilih, sehingga orientasi pemilih terfokus kepada figur yang dikenal.

Perubahan lain dalam Pemilu 2004 yang akan datang adalah perubahan dalam memilih Calon Presiden yang dilakukan secara terpisah dari Pemilu yang hanya memilih para caleg yang akan duduk sebagai anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Jadi, jika dalam pemilu-pemilu sebelumnya, Calon Presiden hanya dipilih oleh MPR maka dalam pemilu besok rakyatlah yang akan memilih Calon Presidennya secara langsung. Konsekuensi logis dari pemilihan langsung orang nomor satu di republik ini adalah bahwa kepala-kepala daerah di semua tingkatan provinsi dan kabupaten/kota juga akan dipilih secara langsung oleh warga.

Tetapi perubahan model pemilihan ini tidak diikuti secara signifikan oleh perubahan "moralitas politik" para elit politisi yang notabene sejak dulu hingga kini tetap mendominasi partai politik mereka. Dengan demikian, baik ditingkat nasional maupun ditingkat lokal, nyaris tidak ada perubahan prilaku politik politisi ditingkat partai politik. Isu utama yang berkembang ditingkat nasional adalah bahwa para caleg dan Capres yang akan berkompetisi dalam Pemilu 2004 nanti masih akan diisi oleh para caleg dan Capres yang selama ini bermasalah. Begitu juga isu utama ditingkat lokal (Sumatera Barat), dengan pengecualian parpol-parpol baru, adalah bahwa para caleg tetap akan didominasi oleh elit parpol masing-masing, yang akhir-akhir ini juga telah divonis oleh warga sebagai politisi bermasalah, kalau tak mau dikatakan sebagai "politisi busuk" yang bebal. Jika isu ini benar adanya maka konsekuensi logisnya adalah bahwa pemilihan kepala daerah secara langsung juga akan terganggu. Gangguannya bukan pada

[1] Disampaikan Dalam *Lokakarya Lintas Forum Warga Se Sumatera Barat II* Di Minangkabau Village, Kota Padang Panjang, 5-7 Januari 2004

[2] Dosen Jurusan Ilmu Politik FISIP Universitas Andalas, saat ini menjabat sebagai Dekan FISIP Universitas Andalas Periode 2004-2008

pemilihan secara langsung itu, melainkan pada mekanisme penetapan calon kepala daerah oleh anggota DPRD yang bermasalah itu. Bayangkan, jika para "politisi busuk" yang mendominasi anggota DPRD yang akan datang maka calon Kepala Daerah yang akan ditetapkan dan yang akan dipilih langsung oleh warga, tentu saja akan bermasalah.

Isu lain yang muncul dalam hubungannya dengan Pemilu 2004 itu adalah mengenai tingkat kesukaran para pemilih (terutama pemilih di desa/nagari) untukmembuat kertas suara mereka menjadi sah. Hasil simulasi cara menggunakan kertas suara yang dilakukan oleh CETRO misalnya untuk kalangan terpelajar, ternyata masih memperlihatkan tingkat kesalahan yang cukup tinggi. Konsekuensi logisnya adalah jika dikalangan terpelajar saja tingkat kesalahannya cukup tinggi, maka tingkat kesalahan dikalangan masyarakat pedesaan/kanagarian akan lebih tinggi lagi. Isu ini sesungguhnya berhubungan dengan "pendidikan pemilih" (*voter education*), sehingga pertanyaannya adalah siapa yang akan melakukan dan bagaimana mekanismenya?

Tulisan ini selanjutnya mau mendiskusikan siasat (strategi dan taktik) serta agenda apa yang selayaknya paling baik dilakukan oleh Forum Warga (Sumatara Barat) untuk menghindari para caleg dan Capres bermasalah itu terpilih dalam Pemilu 2004 yang akan datang? Akhirnya, strategi, taktik dan agenda apa yang perlu dilakukan oleh Forum Warga untuk menghadapi pemilihan kepala daerah secara langsung agar masyarakat tidak salah pilih. Tetapi sebelum kita mendiskusikan persoalan siasat ini, saya mau mendkusikan terlebih dulu persoalan eksistensi Forum Warga ini. Sebab, menurut saya, tidak ada gunanya kita merumuskan strategi, taktik dan agenda yang muluk-muluk sementara Forum Warganya sendiri hanya sebuah "forum di atas kertas".

Eksistensi Forum Warga: "makhluk apa?"

Terus terang hingga saat ini, saya masih *confuse* terhadap apa yang disebut dengan Forum Warga ini. Makhluk apa dia? Mewakili elemen masyarakat manakah mereka? Adakah "Sang Dalang" di balik forum ini? Siapa mereka? Dan apa bedanya dengan Forum Masyarakat dan Forum Rakyat? Apa latar belakang kemunculannya?

Munculnya berbagai Forum Warga di daerah-daerah akhir-akhir ini, tak pelak lagi merupakan fenomena baru dalam organisasi "akar rumput" (*grass roots*) di republik ini. Simaklah misalnya berita *Kompas*, Jum'at, 19 Juli 2002 berikut ini:

> *"Surabaya, Kompas - Konflik kepentingan antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan Wali Kota Surabaya yang belum juga selesai membuat masyarakat bosan. Bagaimanapun, keadaan seperti ini sudah dirasakan sangat merugikan masyarakat, terutama terhadap hak pelayanan publik yang diemban kedua lembaga itu. Di sisi lain, masyarakat wajib terus membayar pajak.Keadaan yang memprihatinkan inilah yang membawa 28 elemen wakil masyarakat mendatangi DPRD dan Wali Kota Surabaya. Sekalipun demikian, kehadiran elemen masyarakat yang menamakan dirinya Forum Warga Surabaya itu, Kamis (18/7), belum "dianggap", terutama oleh anggota DPRD yang menemui mereka.*
>
> *"Kami berharap konflik eksekutif dan legislatif bisa segera diselesaikan dan tidak berkepanjangan. Kami berharap legislatif dan eksekutif bisa melakukan islah atau rekonsiliasi, karena kalau tidak, warga Surabaya yang akan dirugikan," kata Picky Saptandary, Sekjen Dewan Kota Surabaya sebagai salah satu wakil dari 28 elemen masyarakat tersebut.*

Suhu politik akibat keputusan DPRD memberhentikan wali kota itu dikhawatirkan membuat hak-hak masyarakat kota dalam menyampaikan aspirasi menjadi terganggu. "Silakan para petinggi bertikai kalau memang tidak bisa diberhentikan, tetapi jangan mempengaruhi pelayanan yang harus diperoleh publik," kata Aribowo, staf pengajar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Airlangga (Unair) Surabaya yang hadir dalam rombongan itu.

Kedatangan rombongan Forum Warga Surabaya untuk melakukan klarifikasi dan meminta penjelasan dari anggota DPRD mengenai permasalahan yang terjadi hingga munculnya keputusan pemecatan wali kota itu. Selain Pinky yang mewakili Dewan Kota, Forum Warga Surabaya yang ikut dalam pertemuan tersebut di antaranya M Shaleh (Inspirasi), Hesty Amirullah (Pusham Ubaya), Basuki SH (Ketua DPC AAI Surabaya), Karsono (Ketua DHC '45), I Komang Wiarsa (Ketua PKBS), Bambang Budiono (Pusham Unair), dan puluhan elemen masyarakat lainnya".[3]

Atau berita kolom yang diturunkan oleh *Pikiran Rakyat* berikut ini:

"Seiring dengan derap demokratisasi dalam berbagai sendi kehidupan sosial, ekonomi, dan politik saat ini, proses pembangunan kota juga mulai menampakkan perubahan yang mendasar. Sifat yang semula "top-down" dan merupakan urusan pemerintah semata, baik pusat maupun daerah, berangsur-angsur menjadi kegiatan masyarakat di akar rumput (grass roots), dengan motor penggerak elemen masyarakat tertentu khususnya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Sejalan dengan itu, berbagai forum masyarakat dan forum warga bermunculan di berbagai kota. Forum berkembang mulai dari forum diskusi dan tukar pendapat berbagai kelompok masyarakat yang terkait dan peduli dengan masalah perkotaan yang dihadapi sampai mencoba merumuskan, mengambil keputusan, dan mengorganisasikan suatu tindakan bersama (collective action) untuk menangani masalah tersebut.

Di Kota Bandung, misalnya, beberapa LSM beserta kelompok masyarakat perguruan tinggi, asosiasi profesi, serta media membentuk suatu forum dengan nama "Sawarung" (Soreseheun Warga Bandung). Tujuan Pendirian Lembaga ini untuk penguatan peran masyarakat sipil (civil society) dalam penyelenggaraan urusan publik (public affairs) di Kota Bandung.

Singkat kata, dewasa ini urusan pembangunan kota sudah tidak lagi menjadi dominasi para birokrat. Keterlibatan masyarakat yang peduli serta menaruh minat yang besar pada masalah-masalah perkotaan sudah mulai muncul. Hal ini pada gilirannya dapat merupakan mitra serta kontrol kepada pemerintah kota dan DPRD atas pembangunan kota yang dilaksanakannya"[4]

Kutipan di atas memperlihatkan bahwa Forum Warga mengusung berbagai makna, yakni dari latar belakang kemunculan, siapa mereka, elemen-elemen anggota,

---

[3] (Jakarta, Kompas. 19 Juli 2002)

[4] (*Tommy Firman*. "Forum Masyarakat sebagai Basis Pembangunan Kota", *Pikiran Rakyat*, Bandung, Rabu, 3 Mei 2001)

nama forum, bentuk dan tujuan kegiatan mereka, termasuk organisasi penggagas yang paling getol mendorong berdirinya Forum Warga ini.

Tanpa bermaksud mengecilkan peran *PERFORM Project-RTI, Regional Office Sumatera Barat*, yang telah memfasilitasi pembentukan Forum Warga di daerah Kabupaten/Kota dampingan mereka dan Lokakarya Lintas Forum Warga Se Sumatera Barat (kini yang kedua kalinya), sepanjang pengetahuan saya, salah satu penggagas munculnya Forum Warga dipelosok republik ini yang cukup getol adalah INRES (*Institute for Research and Empowering Society*). LSM yang satu ini didirikan pada 10 Desember 1997 dan bermarkas di kota Solo, Jawa Tengah. Mereka misalnya telah mendorong munculnya FORMAS (Forum Masyarakat Sragen), FORWAS (Forum Warga Sukoharjo), FORABI (Forum Rakyat Boyolali) FKMK (Forum Komunikasi Masyarakat Klaten), SAMAWI (Sarasehan Masyarakat Wonogiri) dan FORMASDHA (Forum Masyarakat Dhagsinarga). Keberadaan Forum ini dimaksudkan untuk merespon peluang yang dimunculkan oleh UU no. 22 tahun 1999 yang mengakomodasi pembentukan forum perkotaan.

Latar belakang munculnya Forum Warga, paling tidak menurut INRES, adalah:

1. Gerakan reformasi yang berlangsung saat ini menghadapi tantangan besar berupa masih kuatnya *mainstream* sentralisme kekuasaan oleh pemerintah (termasuk Pemda), sehingga mereduksi peran partisipasi masyarakat sipil.
2. Lemahnya tingkat konsolidasi dan partisipasi politik masyarakat sipil yang berakibat lemahnya solidaritas dan kekuatan aliansi antar *Civil Society Organisation* untuk melakukan *bargaining position* dengan Pemerintah Daerah dan menjalankan peran partisipasi mereka dalam penentuan kebijakan publik.
3. Belum terbangunnya mekanisme yang melembaga untuk proses kontrol masyarakat terhadap kinerja eksekutif dan legislatif daerah.[5]

Tujuan dari pembentukan Forum Warga ini adalah untuk mengkonsolidasikan kekuatan masyarakat sipil guna mendorong munculnya partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan di daerah. Ini berarti Forum Warga juga mencoba ikut menciptakan iklim yang kondusif bagi terwacanakannya demokratisasi sebagai konsekwensi logis dari pelakasanaan otonomi daerah. Dalam arti yang lebih luas, tujuan pendirian Forum Warga ini adalah untuk penguatan peran masyarakat sipil (*civil society*) dalam penyelenggaraan urusan publik (*public affairs*) di daerah. Dus, ada perubahan-perubahan signifikan yang diharapkan dari Forum Warga ini. Meminjam gagasan INRES, dengan mengembangkannya di sani-sini, ada beberapa perubahan yang ingin dicapai melalui kegiatan Forum Warga ini:

Perubahan di tingkat masyarakat:

a) Tumbuhnya kesadaran di berbagai tingkatan kelompok masyarakat sipil di masing-masing daerah (terutama yang tergabung dalam Forum) untuk memposisikan diri dan bergerak sebagai suatu jalinan antar kekuatan yang integral. Jadi, jika sebelumnya di antara mereka lebih banyak bergerak secara sendiri-sendiri sebatas pada lingkup organisasinya maka dalam Forum Warga ini, mereka diharapkan membuat forum dengan formulasi baru. Formulasi baru forum yang kemudian disebut Forum Warga ini berisikan kelompok-kelompok

[5] Lihat INRES Solo 2003.

yang bergerak di bidang masing-masing dan berbeda-beda, namun memiliki visi bersama untuk mendemokratiskan kehidupan bernegara di tingkat daerah. Keberbedaan bidang dan latarbelakang ini justru dijadikan alat untuk saling mengisi ruang kosong yang ada dalam forum itu.

b) Forum Warga yang beranggotakan berbagai kelompok yang berbeda ini, dalam realitas politiknya diharapkan mampu menambah daya tawarnya di hadapan para pelaku politik lain seperti DPRD dan Pemda. Sebab, keberagaman ini sering dianggap merepresentasikan dukungan organisasi basis terhadap partisipasi anggotanya di dalam Forum. Dus, kelompok pelaku politik lainnya merasa perlu untuk memperhatikan setiap aspirasi yang disuarakan Forum. Secara demikian, Forum Warga juga dapat menciptakan ruang publik yang menjadikan masyarakat merasa memiliki alternatif media dan tempat mengaktualisasikan gagasan dan keluh kesahnya terhadap pembuatan kebijakan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Adanya ruang publik ini sekaligus juga dapat memberikan wawasan bagi masyarakat tentang alternatif cara penyampaian gagasan politik secara arif dengan tidak terlalu mengedepankan kekuatan massa (kecuali jika dalam kondisi tertentu).

c) Isu otonomi daerah yang terus diangkat dalam berbagai ruang publik, pada gilirannya diharapkan dapat terdiseminasi secara baik melalui kegiatan Forum Warga ini. Dengan begitu, isu-isu otonomi daerah secara perlahan tapi pasti, dapat dipahami oleh masyarakat (dalam takaran tertentu), sehingga tidak lagi hanya menjadi komoditas golongan elit daerah.

d) Dengan meluasnya pemahaman tentang isu-isu otonomi daerah di kalangan masyarakat ini, diharapkan mendorong mereka untuk ikut berpikir dan mengaktualisasikan gagasan mereka mengenai isu-isu tersebut. Aktualisasi ini, tentunya berangkat dari kasus-kasus yang mereka hadapi, misalnya dalam menyikapi fenomena konflik antar Badan Perwakilan Desa (*Badan Perwakilan Anak Nagari*) dan Kepala Desa (*Wali Nagari*). Atau dalam menyikapi konflik antara KAN (LAN) dan Pemerintahan Nagari tentang aset-aset Nagari.

Perubahan di tingkat Pemda

a) Forum Warga diharapkan dapat mengubah "*mind-set*" Pemda dan Dinas-dinas yang ada di daerah yang selama ini cenderung tertutup dan memiliki "ego sektoral" untuk menyambut tawaran sharing dengan masyarakat (Forum Warga) melalui ruang publik yang disediakan.

b) Forum Warga diharapkan dapat mengubah tipikal birokrat daerah yang selama ini kebanyakan dari mereka tidak memiliki cukup keberanian untuk mendiskusikan masalah-maslah mendasar yang menyangkut kebijakan daerah.

c) Forum Warga juga diharapkan dapat mengubah hambatan psikologis dari birokrat daerah berupa ketakutan akan sikap dan reaksi kelompok DPRD ketika mereka melakukan sesuatu tanpa dikonsultasikan terlebih dahulu dengan DPRD, termasuk dalam memberikan informasi tentang rancangan Peraturan Daerah.

Perubahan di tingkat DPRD

a) Forum Warga diharapkan dapat mengubah persepsi pihak DPRD dalam format yang tepat mengenai hak seluruh masyarakat untuk terlibat dalam proses perumusan kebijakan daerah. Jadi, jika selama ini persepsi anggota DPRD dalam memahami partisipasi masyarakat sebatas pada kemauan DPRD untuk mengundang kelompok tertentu (terutama akademisi) untuk dimintai sumbangan pemikirannya dalam perumusan kebijakan daerah maka melalui Forum Warga ini persepsi seperti itu perlu diubah. Tidak semua persoalan di daerah hanya dapat dipecahkan oleh akademisi. Konflik-konflik khas daerah tertentu misalnya kebiasaan *"cokak banyak"* justeru hanya dapat dipecahkan oleh kalangan masyarakat setempat itu sendiri.
b) Forum Warga dapat diharapkan untuk meyakinkan pihak DPRD agar mereka melibatkan kelompok-kelompok masyarakat yang memiliki keterkaitan dengan rancangan kebijakan yang sedang disusun. Salah satu caranya adalah Forum Warga melakukan pendekatan kepada DPRD agar bersedia membuka ruang dialog dan menerima partisipasi politik masyarakat.

Diskusi kita di atas sekaligus telah memperlihatkan bahwa keanggotaan Forum Warga bersifat terbuka dan multi-pihak. Mereka terdiri dari kelompok organisasi masyarakat, asosiasi profesi, kelompok masyarakat perguruan tinggi, kelompok sektoral (seperti buruh, petani, sopir angkutan), kalangan Pers, dan kelompok LSM sebagai motor utamanya.

Lalu, adakah "Sang Dalang" di balik Forum Warga ini? Siapa mereka? Ada apa di balik itu? Ada udang di balik bakwan?

Tak dapat dipungkiri bahwa nyaris semua Forum Warga yang telah terbentuk mendapat sponsor dana dari pihak asing seperti USAID dan UNDP atau Bank Dunia. Pertanyaannya adalah mengapa penyandang dana asing ini berkepentingan terhadap penguatan masyarakat sipil dengan isu-isu demokratisasi, *good governance* dan *clean government?* Menurut saya, jawabannya sederhana saja, yakni bahwa isu-isu tersebut sesungguhnya adalah isu-isu yang khas "neo-liberalisme". Dus, mereka sesungguhnya berkepentingan misalnya di bidang politik untuk memperkuat demokratisasi di semua level kehidupan. Di bidang ekonomi, mereka bernafsu untuk melanggengkan sistem kapitalisme model baru (model yang kelihatannya lebih manusiawi) sebagai *mode of production* masyarakat yang paling aman. Salah satu *"orgasme politik"* yang mau mereka capai adalah terciptanya *open society*, yang antara lain berbasiskan pluralisme, legal-rasional, dan "dunia tanpa batas". Dan, tentu saja salah satu tujuan finalnya adalah menancapkan kuku dominasi Barat yang lebih dalam di negara-negara sedang berkembang. Meskipun model ini mempunyai efek positif antara lain mendorong keterlibatan masyarakat multi-pihak dalam urusan-urusan publik, tetapi model ini sekaligus juga menyimpan efek negatif. Salah satu efek negatif dari semua ini adalah pelanggengan sekularisme dan ketergantungan masyarakat negara berkembang kepada budaya dan peradaban Barat.

Pertanyaan kita sekarang adalah bagaimana dengan eksistensi Forum Warga (kabupaten/kota) di Sumatera Barat yang sedang berkumpul di sini? Siapa mereka? Apakah mereka telah mewakili seluruh elemen masyarakat? Elemen masyarakat yang

mana? Apa saja yang telah mereka kerjakan? Perubahan-perubahan apa yang telah terjadi baik ditingkat masyarakat maupun ditingkat Pemda dan DPRD sebagai hasil dari Forum Warga (kabupaten/kota) Sumatera Barat ini? Kegagalan apa saja yang telah ditemui? Kendala-kendala apa saja baik di tingkat masyarakat maupun ditingkat Pemda dan DPRD, yang telah ditemui forum ini? *"Mati monciak dalam lubang?"* Pertanyaan pertanyaan ini harus kita jawab secara jujur dalam pertemuan kita ini.

Menyiasati Para Politisi Busuk dalam Pemilu 2004

Diskusi kita tentang Eksistensi Forum Warga di atas akan berakibat pada pilihan-pilihan strategi, taktik dan agenda dalam menghadapi Pemilu 2004 yang akan datang. Jika eksistensi Forum Warga kita, meminjam bahasa *Kompas*, ternyata belum "dianggap" oleh Pemda dan DPRD maka pilihan strategi, taktik dan agenda kita harus lebih diarahkan kepada *strategi penguatan kemampuan, peran dan sinergi Forum Warga*, ketimbang membangun strategi untuk berperan dalam Pemilu 2004 itu. Siapa yang akan "menganggap" kita kalau kita rentan secara kelembagaan?

Meskipun pilihannya agaknya sulit, Saya akan mencoba menawarkan beberapa strategi, taktik dan agenda Forum Warga untuk menghindari para "politisi busuk" menang dalam Pemilu 2004 itu. Saya andaikan saja bahwa Forum Warga (di kabupaten/kota) Sumatera Barat yang berkumpul pada hari ini adalah Forum Warga yang sudah sukses melakukan berbagai perubahan dalam berbagai tingkatan di atas. Istilah strategi yang Saya pakai di sini adalah serangkaian cara atau rencana umum untuk mencapai suatu tujuan jangka panjang. Sedangkan taktik adalah semua aktivitas yang dilakukan untuk mencapai tujuan jangka panjang itu. Kadang-kadang taktik dimaknai sebagai serangkaian cara untuk mencapai tujuan jangka pendek sebagai bagian dari tujuan jangka panjang itu. Strategi dan taktik harus dipandu oleh program dan didasarkan pada suatu ideologi tertentu.

Kalau demikian halnya, kita harus mulai dari apakah program Forum Warga? Forum Warga mestinya mencakup beberapa item berikut ini:

1. Program Pembentukan Forum warga
2. Program Penguatan Forum warga
3. Program Pengawasan DPRD
4. Program Pengawasan PEMDA
5. Program Monitoring Institusi Publik
6. Program Pemberdayaan Masyarakat Nagari
7. Program Pemberdayaan Masyarakat Kota
8. Program Pemberdayaan Politik Perempuan
9. Program Kampanye Anti Politisi Busuk dalam Pemilu 2004
10. Program *voter education*
11. Program Menyukseskan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung

Jadi, jika program Forum Warga (kabupaten/kota) Sumatera Barat yang paling mendesak saat ini adalah Program Kampanye Anti Politisi Busuk dalam Pemilu 2004 maka pilihan strateginya dapat dirancang sebagai berikut.

1. Strategi advokasi politisi bersih dan potensial
2. Strategi *pressure* kepada Parpol yang memasang politisi busuk
3. Strategi Galang Kerjasama dengan Media Massa dengan menulis berbagai artikel yang memojokkan politisi busuk (Strategi ini sering disebut sebagai "*making public opinion strategy*" dengan melibatkan kelas menengah perkotaan yang handal dalam menulis
4. Strategi *Networking* dengan multi pihak yang anti politisi busuk

Taktik untuk stategi 1 hingga 4 dapat dilakukan dengan berbagai cara misalnya:

1. Taktik "unjuk rasa"
2. Taktik *class action*
3. Taktik "mogok makan", dan
4. Taktik mobilisasi massa untuk kampanye anti politisi busuk

Agenda yang dapat dirancang dalam konteks strategi dan taktik di atas, mungkin gagasan berikut ini dapat dipertimbangkan:

1. *Voter education* kepada pemilih untuk Pemilu 2004
2. Mempersiapkan warga untuk melakukan akad terhadap para caleg dalam Pemilu 2004
3. Mempersiapkan warga untuk menentukan sikap terhadap Politisi Busuk
4. Mempersiapkan *Media Centre* sebagai ruang dialog publik untuk mencerdaskan para pemilih
5. Membentuk dan memperkuat jaringan lintas Forum Warga yang berbasis nagari

Atau secara lebih luas, gagasan INRES berikut ini dapat pula dipertimbangkan.

1. Pelatihan warga guna memberdayakan kemampuan partisipasi politik rakyat, melalui pelatihan tentang hak-hak masyarakat sipil, pelatihan advokasi dan pelatihan *legal standing*
2. Pembangunan ruang dialog publik sebagai instrumen untuk mewacanakan isu-isu populis, melalui seminar dan lokakarya, pembukaan kotak pos pengaduan masyarakat dan *public hearing* dengan lembaga DPRD, dan dialog antar *stakeholder* kabupaten dan kota (*Strategic Meeting*).
3. Kampanye demokrasi untuk membuka kesadaran masyarakat akan hak-hak politik mereka melalui pembuatan poster dan leaflet

Strategi, Taktik dan Agenda Forum Warga Menghadapi Pemilihan Langsung Kepala Daerah

Akhirnya jika program Forum Warga adalah menyukseskan pemilihan Kepala Daerah secara langsung maka strategi dan taktik di atas diubah menjadi sebagai berikut.

1. Strategi advokasi calon kepala daerah bersih dan potensial
2. Strategi *pressure* kepada Fraksi-fraksi DPRD yang memasang calon Kepala Daerah yang bermasalah
3. Strategi "*making public opinion*" dengan melibatkan kelas menengah perkotaan yang handal dalam menulis

4. Strategi *Networking* dengan multi pihak yang anti calon Kepala daerah yang bermasalah

Taktik untuk stategi 1 hingga 4 dapat dilakukan dengan berbagai cara misalnya:

1. Taktik "unjuk rasa"
2. Taktik *class action*
3. Taktik "mogok makan", dan
4. Taktik mobilisasi massa untuk kampanye anti kepala daerah bermasalah

Agenda yang dapat dirancang dalam konteks strategi dan taktik di atas, mungkin gagasan berikut ini dapat dipertimbangkan:

1. Sosialisasi UU tentang Pemilihan Kepala Daerah secara langsung
2. Membentuk dan memperkuat jaringan lintas Forum Warga yang berbasis nagari
3. Mempersiapkan warga untuk melakukan akad terhadap para calon Kepala Daerah
4. Mempersiapkan warga untuk menentukan sikap terhadap calon Kepala Daerah yang bermasalah
5. Melakukan pelatihan kepada warga tentang hak-hak warga dalam perencanaan pembangunan daerah dan penyusunan APBD yang partisisipatif, serta pelatihan advokasi dan pelatihan legal standing

- Membuka kotak pos pengaduan masyarakat tentang calon Kepala Daerah

Saya pikir, Saya harus mengakhiri gagasan saya ini. Sekian.

DAFTAR PUSTAKA

UU No. 30 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum

Jakarta, Kompas, 19 Juli 2002

Tommy Firman, "Forum Masyarakat sebagai Basis Pembangunan Kota", *Pikiran Rakyat*, Bandung, Rabu, 3 Mei 2001

Drs. Doddy Rudianto, MM & Drs. Budi Sudjijono, MM. 2003.*Manajemen Pemasaran Partai Politik: Segmentation, Targeting, Positioning*. Jakarta.PT Citra Mandala Pratama,